BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu unsur pengawas internal di bawah Kementerian Agama yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Agama. Sejarah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tidak terlepas dari perjalanan panjang institusi Kementerian Agama yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada awalnya, fungsi pengawasan internal belum berdiri secara terpisah. Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam struktur kementerian. Seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan dan kebutuhan akan pengawasan yang lebih terstruktur, dibentuklah Inspektorat Jenderal sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta efisien di Kementerian Agama.



Gambar 2. 1 Logo Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

Peran Inspektorat Jenderal menjadi semakin penting setelah reformasi birokrasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Pada saat itu, dorongan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel semakin kuat. Oleh karena itu, Itjen Kementerian Agama terus bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan peningkatan pengawasan serta akuntabilitas publik.

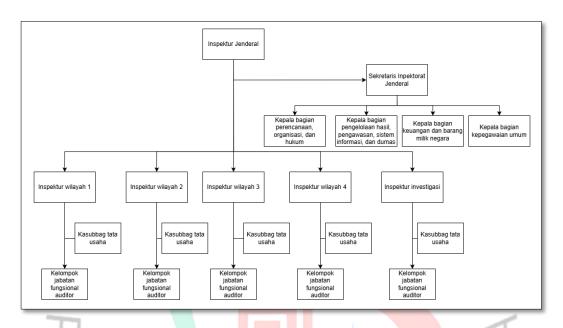
Fungsi utama Inspektorat Jenderal adalah untuk melakukan pengawasan internal, audit, evaluasi, serta investigasi terhadap berbagai kegiatan dan kebijakan di Kementerian Agama. Hal ini termasuk pengawasan atas penggunaan anggaran, program-program pembangunan, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di bidang pendidikan agama, haji, dan kehidupan keagamaan secara umum. Dalam perkembangannya, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah menjadi lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga berperan aktif dalam memperbaiki dan meningkatkan integritas birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Itjen untuk mendukung pencapaian visi Kementerian Agama, yaitu menciptakan masyarakat yang agamis, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Inspektorat Jenderal juga terus memperkuat kapasitas pengawasannya dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses audit dan pengawasan. Transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan serta mempermudah akses informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengawasan. Dengan sejarah yang panjang dan peran strategis yang terus berkembang, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di sektor agama, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

ANGU

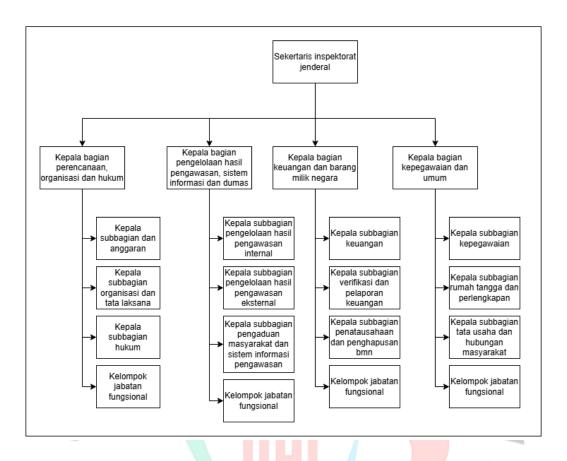
2.2 Struktur Organisasi

Berikut adalah Struktur organisasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.



Gambar 2. 2 Struktur Organisa<mark>si Inspektorat</mark> Jenderal Keme<mark>nterian</mark> Agama RI





Gambar 2. 3 Struk<mark>tur Organisas</mark>i Bagian Sekret<mark>ariat</mark>

Selama program Kerja Profesi, di tempatkan pada bagian Sistem Informasi Pengawasan dan memiliki tugas sebagai *Front End Web Developer*. Front-End Developer merupakan sebuah profesi dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan dan pemeliharaan antarmuka pengguna (User Interface) dari sebuah aplikasi atau situs web (Hanif, n.d.). Bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pengawasan internal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Divisi ini berfokus pada pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi yang digunakan untuk memonitor dan mengawasi berbagai kegiatan serta program di lingkungan Kementerian Agama.

2.3 Kegiatan Rutin Perusahaan

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI secara rutin melaksanakan kegiatan pengawasan internal yang mencakup audit berkala, evaluasi program kerja, dan pemeriksaan khusus. Audit internal dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien di seluruh unit kerja kementerian. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilaporkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan rutin lainnya termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pengawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Agama.

